

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Penelitian

Perusahaan dalam mencapai tujuannya membutuhkan dana untuk memperlancar jalannya aktivitas usaha. Sumber dana yang dibutuhkan itu dapat diperoleh dari dalam perusahaan itu sendiri maupun dari luar perusahaan. Dana yang didapatkan dari luar perusahaan itu kemudian akan timbul sebagai utang. Adapun perusahaan-perusahaan itu tergolong menjadi tiga sektor di Indonesia, ketiga sektor tersebut adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) dan Koperasi. Koperasi menjadi salah satu pelaku ekonomi yang sampai saat ini masih diterapkan pada tatanan perekonomian Indonesia.

Koperasi merupakan soko guru perekonomian nasional dan merupakan suatu kekuatan ekonomi yang tumbuh dan berkembang dikalangan masyarakat sebagai pendorong tumbuhnya perekonomian. Koperasi sebagai organisasi ekonomi yang berasaskan kekeluargaan memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.”

Berdasarkan pengertian tersebut dijelaskan mengenai gerakan ekonomi berdasarkan asas kekeluargaan. Maksud dari makna kekeluargaan dalam koperasi artinya setiap anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama.

Koperasi Pegawai Republik Indonesia-Korps Pegawai Kesehatan Sumedang (KPRI-KPKS) merupakan koperasi yang beralamat di Jalan Prabu Geusan Ulun No.75, Regol Wetan, Sumedang Selatan, Kotakulon, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat-45362 dengan SK Badan Hukum Nomor 7085/BH/PDD/PAD/KWK.10/III/98 tertanggal 18 Maret 1998. KPRI-KPKS merupakan koperasi yang usahanya *multi purpose*, artinya ada beberapa unit usaha yang dijalankan bertujuan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya yang sesuai dengan kebutuhan anggotanya. Beberapa unit usaha KPRI-KPKS adalah sebagai berikut:

1. Unit Simpan Pinjam
2. Unit Perdagangan Umum
3. Unit Percetakan (Fotocopy)
4. Unit Sewa Gedung Seba Guna
5. Unit Penyewaan Alat Pesta

Agar seluruh unit usaha dapat menghasilkan laba yang optimal, salah satu keputusan penting yang harus dihadapi oleh KPRI-KPKS adalah untuk merancang kebijakan yang akan diambil berkaitan dengan keputusan atas struktur modal.

Menurut Irham Fahmi (2017:179) Struktur modal merupakan gambaran dari bentuk finansial perusahaan yaitu Antara modal yang dimiliki yang bersumber dari

utang jangka panjang (*long-term liabilities*) dan modal sendiri (*shareholder's equity*) yang menjadi sumber pembiayaan perusahaan.

Kombinasi modal sendiri dengan modal pinjaman pada berbagai koperasi memiliki pola yang berbeda-beda. Ada koperasi yang memiliki modal pinjaman yang lebih besar dari pada modal sendiri ataupun sebaliknya. Hal tersebut sepintas merupakan hal yang wajar, namun pada dasarnya merupakan permasalahan keputusan pendanaan (struktur modal). Masalah pendanaan merupakan masalah penting yang harus diperhitungkan oleh para investor. Menurut Hilmi (2010), masalah pendanaan merujuk pada permodalan, baik ketika pendirian, pada saat perusahaan berjalan normal, maupun saat perusahaan mengadakan perluasan usaha. Hal ini sesuai dengan pendapat Modigliani dan Miller dalam Muhammad Umar Mai (2013:2) tentang pentingnya modal pinjaman dalam struktur modal perusahaan.

Modal pinjaman bisa digunakan untuk menghemat pajak, karena bunga yang dihasilkan atas penggunaan modal pinjaman bisa dipakai sebagai pengurang pajak. Implikasi dari teori tersebut adalah perusahaan sebaiknya menggunakan modal pinjaman sebanyak-banyaknya. Namun dalam praktiknya, tidak ada perusahaan yang seluruh sumber modalnya berasal dari modal pinjaman, karena semakin tinggi tingkat modal pinjaman maka semakin tinggi pula kemungkinan risiko kebangkrutannya. Kebijakan struktur modal penting karena dapat mempengaruhi kondisi keuangan koperasi dan mempengaruhi nilai perusahaan koperasi. Selain itu kebijakan struktur modal juga dapat memprediksi kelangsungan hidup perusahaan koperasi. Kondisi keuangan koperasi adalah yang paling berpengaruh

terhadap perubahan struktur modal. Pentingnya struktur modal di KPRI-KPKS karena struktur modal yang dipilih akan menentukan kondisi keuangan dari KPRI-KPKS, KPRI-KPKS memilih struktur modal dengan kebijakan lebih banyak menggunakan modal sendiri dibandingkan dengan modal pinjaman. Namun KPRI-KPKS tetap memanfaatkan modal pinjaman dari anggota, alasannya karena KPRI-KPKS ingin memberi kesempatan kepada anggota untuk ikut berpartisipasi dalam penanaman modal seperti simpanan manasuka, simpanan berhadiah, dan simpanan khusus. Struktur modal koperasi menunjukkan presentase besarnya utang dan modal sendiri yang dimiliki.

Salah satu alat ukur untuk mengetahui seberapa besar modal perusahaan yang dibiayai oleh utang adalah dengan menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER). Menurut Kasmir (2017:157-158) *Debt to Equity Ratio* (DER) merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas.

**Tabel 1.1 Perkembangan Struktur Modal pada KPRI-KPKS
Tahun 2014-2018**

Tahun	Total Kewajiban (Rp)	Total Modal Sendiri (Rp)	DER
2014	10,751,408,929.00	14,280,209,702.00	75%
2015	11,648,974,716.00	16,327,542,336.00	71%
2016	12,370,273,430.00	18,724,906,528.00	66%
2017	12,324,028,351.00	21,011,191,147.00	59%
2018	13,277,477,624.00	22,167,999,073.00	60%

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dijelaskan bahwa sumber modal KPRI-KPKS lebih besar menggunakan modal sendiri dibandingkan dengan modal pinjaman. Ini

artinya kebijakan struktur modal pada KPRI-KPKS termasuk dalam *Pecking Order Theory* dimana KPRI-KPKS lebih memilih untuk menggunakan sumber dana dari dalam atau pendanaan internal daripada pendanaan eksternal, perbandingan modal sendiri dengan modal pinjaman pada tahun 2018 adalah sebesar Rp 22,167,999,073 : Rp 13,277,477,624 dan jika di presentasikan adalah sebesar 63% : 37%. Kebijakan struktur modal pada KPRI-KPKS cenderung menggunakan modal sendiri (modal internal). Kebijakan tersebut dipilih oleh KPRI-KPKS dengan alasan bahwa KPRI-KPKS ingin menekan atau meminimalkan biaya modal, karena modal yang bersumber dari internal (anggota) biaya modalnya dianggap lebih kecil dibandingkan dengan biaya modal jika KPRI-KPKS meminjam dari pihak luar (bank). Besar kecilnya biaya modal akan berpengaruh pada tingkat profitabilitas yang diperoleh oleh koperasi.

Profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai perusahaan, bagi koperasi profitabilitas ini dapat mencerminkan kemampuan koperasi dalam memperoleh laba dengan memanfaatkan modal yang dimiliki. Ada beberapa ukuran yang digunakan untuk melihat kondisi profitabilitas perusahaan, salah satunya yaitu dengan menggunakan tingkat pengembalian atas investasi pemegang saham yang sering disebut dengan *Return on Equity* (ROE). Sedangkan dalam koperasi ROE digunakan untuk melihat profitabilitas koperasi, yaitu dengan menggunakan tingkat pengembalian atas modal sendiri yang berasal dari anggota meliputi simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan lainnya.

Menurut Susan Irawati (2006:61) *Return on Equity* (ROE) digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari modal sendiri yang digunakan oleh perusahaan tersebut.

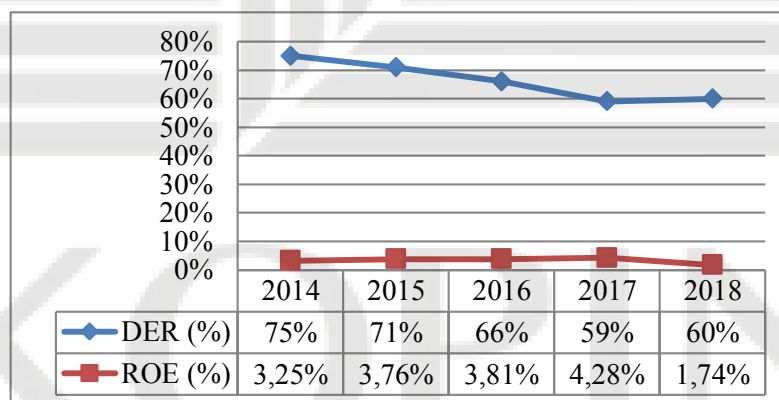
Tabel 1.2 Perkembangan *Return on Equity* (ROE) pada KPRI-KPKS Tahun 2014-2018

Tahun	SHU Setelah Pajak (Rp)	Modal Sendiri (Rp)	ROE (%)
2014	464,641,228.00	14,280,209,702.00	3.25%
2015	614,363,191.00	16,327,542,336.00	3.76%
2016	714,064,783.00	18,724,906,528.00	3.81%
2017	900,245,205.00	21,011,191,147.00	4.28%
2018	385,582,027.00	22,167,999,073.00	1.74%

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan tabel 1.2, dapat diketahui bahwa *Return on Equity* (ROE) KPRI-KPKS dari tahun 2014 sampai dengan 2018 adalah 3.25%, 3.76%, 3.81%, 4.28%, dan 1.74%. Sedangkan standar industri *Return on Equity* (ROE) menurut Lukviarman adalah sebesar 8.32%, jadi *Return on Equity* (ROE) KPRI-KPKS dapat dikatakan kurang baik karena belum mencapai standar industri.

Grafik perkembangan Struktur Modal dan *Return on Equity* (ROE) KPRI-KPKS:



Gambar 1.1. Grafik Perkembangan Struktur Modal dan ROE KPRI-KPKS Tahun 2014-2018

Sumber : Hasil Pengolahan data

Berdasarkan gambar 1.1 dapat dilihat bahwa nilai Struktur modal pada KPRI-KPKS pada tahun 2014 adalah 75%, angka tersebut terus menurun hingga tahun 2017 yaitu sebesar 59%, namun pada tahun 2018 mengalami kenaikan menjadi 60%. Hal ini dapat diartikan bahwa utang yang digunakan untuk mendanai modal cenderung menurun dari tahun ke tahun. Dengan hutang yang semakin menurun berarti beban hutang akan berkurang dan biaya bunga hutang juga semakin kecil, hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan profitabilitas.

Sedangkan dapat dilihat bahwa *Return on Equity* (ROE) menunjukkan peningkatan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, sedangkan pada tahun 2018 terjadi penurunan menjadi 1.74%, artinya KPRI-KPKS memiliki modal sendiri yang cukup besar tetapi tidak membuat *Return on Equity* (ROE) semakin besar pula. Standar rasio industri untuk *Return on Equity* (ROE) adalah 8.32% (Lukviarman (2006:36)).

Profitabilitas yang diperoleh koperasi dapat berdampak kepada meningkatnya kesejahteraan anggota dan pendapatan anggota. Dengan meningkatnya keuntungan koperasi juga akan meningkatkan sisa hasil usaha yang diperoleh anggota yang merupakan salah satu manfaat ekonomi tidak langsung yang dapat diterima anggota. Hendaknya koperasi lebih mempertimbangkan tingkat efisiensi penggunaan modal atau alokasi modal, karena tujuan utama dari penggunaan modal atau alokasi modal adalah untuk memperoleh profitabilitas. Pada kenyataannya, dengan profitabilitas yang rendah diduga koperasi belum bisa memberikan manfaat ekonomi langsung maupun manfaat ekonomi tidak langsung.

Berdasarkan fenomena yang terjadi pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia-Korps Pegawai Kesehatan Sumedang, maka peneliti mengajukan penelitian dengan judul:

“KEBIJAKAN STRUKTUR MODAL DAMPAKNYA TERHADAP RETURN ON EQUITY DAN MANFAATNYA BAGI EKONOMI ANGGOTA)” (Studi Kasus pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia-Korps Pegawai Kesehatan Sumedang (KPRI-KPKS))

1.2. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana kebijakan struktur modal yang telah diterapkan pada KPRI-KPKS diukur dengan *Debt to Equity Ratio* (DER)
2. Bagaimana perkembangan *Return on Equity* (ROE) pada KPRI-KPKS
3. Bagaimana dampak struktur modal terhadap *Return on Equity* (ROE) pada KPRI-KPKS
4. Bagaimana manfaat ekonomi anggota baik secara langsung maupun tidak langsung pada KPRI-KPKS

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:

1.3.1. Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kebijakan struktur modal yang telah diterapkan dan dampaknya terhadap *Return on Equity* pada KPRI-KPKS serta manfaatnya bagi ekonomi anggota.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Kebijakan Struktur Modal yang telah diterapkan pada KPRI-KPKS
2. Perkembangan *Return on Equity* (ROE) pada KPRI-KPKS
3. Dampak Struktur Modal terhadap *Return on Equity* (ROE) pada KPRI-KPKS
4. Manfaat ekonomi anggota baik secara langsung maupun tidak langsung pada KPRI-KPKS

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Aspek Teoritis

Dari data empirik yang didapatkan, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan kajian untuk memperluas atau mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang manajemen keuangan khususnya, selain itu penelitian ini juga berguna untuk ilmu Rasio Keuangan. Karena Rasio Keuangan merupakan hal penting yang digunakan sebagai salah satu alat analisis untuk melihat kondisi suatu perusahaan, maka dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi penelitian selanjutnya.

1.4.2. Aspek Guna Laksana

Bagi KPRI-KPKS, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak koperasi dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pengurus dan karyawan lainnya dalam rangka pengembangan usaha koperasi saat ini maupun di masa yang akan datang.